

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

Siti Halilah

**Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Email: sitihalilahsh@yahoo.com

Abstrak

Peran KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih mulai dari pemula hingga lanjut usia serta yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilu maupun Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyelenggaraan pemilu dan Pilkada peran komunikator dan pengelolaan pesan terasa sangat penting. Karena akan menentukan penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU dapat diterima dengan baik atau tidak, sehingga masyarakat berubah sikap untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan angka golput yang masih tinggi, hadirnya sosialisasi yang menjadi program KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk apatisisme masyarakat pada perpolitikan Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat.

Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Golput.

Abstract

The role of the KPU in carrying out political education for voters ranging from beginners to the elderly and namely the KPU has carried out its duties and authorities by providing socialization programs to the community, especially beginner voters and was greeted with high enthusiasm from the community so that the KPU's goal is for the community to participate in the General Election and Pilkada in West Tanjung Jabung Regency. In the process of holding elections and local elections, the role of the communicator and message management is very important. Because it will determine whether the dissemination of information carried out by the KPU is well received or not, so that people change their attitude towards exercising their right to vote in general elections. This is shown

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

by the still high number of abstentions, the presence of socialization which is part of the West Tanjung Jabung Regency KPU program as a form of public apathy towards Indonesian politics. The low level of public political participation is influenced by various factors, one of which is the lack of public political awareness.

Keywords: Election Commission, Political Participation, Abstentions.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan kepada rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dengan cara melakukan pemilihan yang dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wadah. Salah satu perwujudan dilaksanakannya demokrasi di Indonesia adalah dengan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung yang mana lokasi untuk tempat pemilihan disebut dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. KPU mempunyai tugas menyelenggarakan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹

¹Efriza. *Political explore*: Sebuah kajian ilmu politik. (Bandung: Alfabeta. 2012). Hlm. 36.

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara pemimpin tingkat Provinsi, pemimpin tingkat wali kota hingga kabupaten beserta wakil-wakil berbentuk Dewan Perwakilan Rakyat tingkat I dua II hingga pusat dan perwakilan daerah, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah memilih pemimpin dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Hal ini wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan notaben masyarakat yang mudah terpengaruh oleh beberapa oknum dan stigma “politik” yang identik dengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap dunia politik Indonesia.

Faktor-faktor yang menjadikan partisipasi politik masyarakat kurang terutama dalam memberikan suaranya dalam pemilu dan pilkada, dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu pilkada di setiap daerah khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalanya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia.

Indonesia dengan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin dilakukanlah pemilu dan pilkada, artinya setiap pemimpin dipilih melalui suara rakyat dalam agenda Pemilihan Umum. Untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pemilu dibutuhkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa paksaan serta tanpa ancaman yang sesuai dengan

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

UUD 1945 Pasal 22 E tentang Pemilihan Umum, mengenai pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berhasil dibutuhkan peran KPU dalam menanamkan kesadaran berpolitik masyarakat terutama dalam menggunakan hak pilihnya. KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara Republik Indonesia. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas.

Peran KPU haruslah dioptimalkan guna menghindari terjadinya tindakan golput dari masyarakat. Golongan putih atau yang dikenal sebagai golput adalah tindakan pemilih untuk tidak menggunakan suaranya. Golput sendiri berawal saat para mahasiswa melakukan sebuah tindakan protes dengan tidak memilih dalam Pemilu 1971, yaitu pada masa rezim Orde Baru. Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas.

Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. Pasca reformasi, Pemilu dianggap lebih demokratis dan golput mengalami perubahan makna menjadi sebuah bentuk apatisisme politik. sikap apatisisme dalam sebuah ranah demokrasi adalah hal yang salah, demokrasi menuntut partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan di sebuah negara. Oleh karena itu, peran KPU sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik terutama dalam memberikan suara pada pemilu dan pilkada dengan memutus rantai golput dengan cara melakukan sosialisasi dengan sebutan “Relawan Demokrasi” dibawah naunagn KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai jenis yang disebut dengan basis mulai dari basis pemula hingga disabilitas yang mulai sejak tahun 2019 pada saat pemilu atau dikenal dengan pemilihan presiden dan waki presiden. Dengan adanya relawan demokrasi ini pihak KPU berharap dapat meminimalisir angka

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

golput pada pemilu tersebut hingga pada tahun 2020 pun dilaksanakan Relawan Demokrasi kembali karena dirasakan sangat membantu.²

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat dengan cara program relawan demokrasi, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal.³

LANDASAN TEORI

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah pesta demokrasi secara langsung yang dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin lima tahun kedepan yang akan memimpin suatu Negara, provinsi, kota madya hingga tingkat kabupaten. Dimana masyarakat melakukan pencoblosan terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya, sehingga suara mayoritas menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Maka dari itu setiap warga negara wajib menyalurkan hak suaranya demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah sudah menganjurkan agar masyarakat tidak Golput, tapi mengapa masih banyak masyarakat yang masih melakukan atau memberlakukan sistem itu disebabkan oleh pemikiran yang masih kurang memahami terkait politik, sehingga mereka berfikir akan merasa rugi jika mereka melakukan pencoblosan karena yang mereka dapat hanya akan buang-buang waktu saja ketika mendatangi TPS sektempat, masyarakat lebih baik mengerjakan pekerjaan rumah dari pada mereka mendatangi TPS setempat.⁴

²Anonime. (2019). Apa Sih Golput Itu? medium.com. <https://medium.com/sayagolput/apa-sihgolput-itu-b2d4e3ee22a6> Arianto, B. (2011).

³Fred R. David. Manajemen Strategi Konsep. (Jakarta: Pt. Prenhallindo. 2012). Hlm. 175.

⁴Fahmi, Khoiril. (2010), "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Presiden 2009 (Studi di Kota Pekanbaru)". Tesis, Pekanbaru: tidak dipublikasikan.

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

Penelitian terdahulu, telah banyak dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang melakukan riset dan observasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada yang masih rendah. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor di antaranya rendahnya kesadaran pada setiap individu mengenai demokrasi dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang melakukan pemilihan berdasarkan oleh keluarga, agama, status sosial, kader partai politik, dan yang hanya ikut-ikutan saja dalam memilih calon tanpa mengenal visi dan misi yang akan dijalani selama lima tahun kedepan, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran politik juga menjadi salah satu faktor terbesar yang ada pada setiap masyarakat pemilih.⁵

Faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan Pilkada. Selain karena faktor yang terdapat pada diri masyarakat itu sendiri, faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat mengenai jalannya Pemilu dan juga pemilu dan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kurangnya kredibilitas para bakal calon-calon yang dirasa tidak transparan.

Namun, di sisi lain mengenai tindakan golput yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terjadi karena masyarakat menganggap bahwa itu haknya dalam memilih seseorang/kelompok hanya sia-sia belaka. “Golput sendiri merupakan hak politik. Selain tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan perbuatan kriminal. Yang dilarang dan dapat terkena delik hukum adalah bila terbukti mengajak orang tidak memilih atau melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.”⁶

⁵Adityaningsih, D. P. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.

⁶Japrizal. (2019), Partipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 (Studi di Kecamatan Tampak Pekanbaru) Tesis, Pekanbaru: tidak dipublikasikan. Kristiadi, J, 1997.

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yaitu deskriptif naturalistik karena dalam penelitian ini dilakukan pendeskripsian mengenai peranan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada serta dalam meminimalisir golput.⁷ Penelitian ini menggunakan metode studi naturalistik. Metode studi naturalistik adalah yang menjelaskan atau menceritakan secara alami tanpa adanya perubahan yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang terkait, penelitian berupa jurnal mengenai peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, jurnal mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serta jurnal mengenai pengaruh golput.⁸

PEMBAHASAN

Sosialisasi berpolitik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik yang bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin maupun secara tidak langsung memengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan/individu maupun berkelompok dalam memberikan suara/pandangan/pendapat/kritik/saran kepada ruang lingkup pemerintah dan lembaga-lembaga di bawah pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh semua warga negara Indonesia terutama berusia dewasa untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah memberikan suara pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Namun, dilihat dari berbagai daerah yang melaksanakan pilkada untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikotawakil walikota, memberikan fakta bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pilkada masih sangat kurang.

⁷Deddy Mulyana.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010). Hlm. 38.

⁸Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. 20170. Hlm. 32.

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada setiap individu di masyarakat, di antaranya: 1. Rendahnya Kesadaran Pada Setiap Individu Rendahnya kesadaran pada setiap individu mengenai demokrasi dan kewajibannya sebagai warga negara ditunjukkan oleh masyarakat yang melakukan pemilihan berdasarkan oleh keluarga, agama, status sosial, kader partai politik, dan yang hanya ikut-ikutan saja. Dalam hal ini jelas masyarakat melakukan partisipasi bukan berdasar pada kesadaran dirinya pribadi mengenai haknya sebagai warga negara untuk memilih kepala daerah atau pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya, melainkan karena faktor psikologis yang ada pada individu itu sendiri. 2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesadaran Politik Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran politik juga menjadi salah satu faktor terbesar yang ada pada setiap masyarakat pemilih. Hal ini sangat berpengaruh karena pada dasarnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai haknya sebagai warga negara, dan bagaimana haknya dalam keputusan politik pemimpin. Masyarakat tidak memiliki pemahaman betapa pentingnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pilkada. Karena kurangnya pengetahuan turut berpengaruh pada kesadaran berpolitik individu itu sendiri. 3. Kurangnya Sosialisasi yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap masyarakat mengenai jalannya pemilu dan pilkada turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap kurang mensosialisasikan kegiatan politik seperti kampanye para calon yang merupakan hal yang harus diketahui setiap masyarakat pemilih terutama dalam visi-misi serta tujuan yang ingin disampaikan para bakal calon pemimpin, kurang tersosialisasikannya proses pemilihan, serta panduan untuk pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. 4. Kurangnya Kredibilitas Para Bakal Calon Pemimpin Kurangnya kredibilitas para bakal calon pemimpin yang dirasa tidak transparan sehingga membuat masyarakat enggan untuk menyumbangkan suaranya, para calon yang melakukan kampanye masih memiliki kekurangan dalam mengkomunikasikannya pada masyarakat. Selain itu,

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

masyarakat pun tidak terlepas dari stigma bahwa siapapun yang terpilih tidak dapat memberikan perubahan mengenai kondisi kehidupannya untuk menuju kehidupan yang ideal. 5. Rendahnya Rasa Percaya Pada Pemerintah Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap partai politik, terhadap calon pemimpin daerah yang dianggap janji-janji, visi-misi yang diutarakan pada saat kampanye adalah janji palsu yang akan dilupakan setelah duduk di tahta pemimpin. Hal ini dirasa sudah biasa bagi para pemimpin yang terpilih ketika menduduki jabatannya. Kesejahteraan masyarakat akan tergantikan oleh kesejahteraan pribadi dan golongan tertentu.

Akibatnya, masyarakat memiliki masalah kepercayaan terhadap pemerintah. Faktor yang menjadi pengaruh dalam rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada politik, akan bertambah ketika hadirnya tindakan golput dari masyarakat sebagai bentuk kurangnya kesadaran berpolitik masyarakat dan dianggap sebagai sebuah sikap apatisme terhadap politik di Indonesia. Golput pertama kali muncul pada tahun 1971 sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terutama mahasiswa pada masa rezim Soeharto, yang melihat bahwa sistem pemerintahan dan sistem politik tidak akan ada perubahan atau perbaikan baik untuk masyarakat maupun untuk negaranya. Namun, pada masa kini, golput sering terjadi dikarenakan pertama faktor teknis, misalnya, pemilih tidak bisa hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sesuatu hal, seperti tidak adanya kartu undangan pemilihan, ataupun masalah masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini menjadi gambaran ke-apatisme-an masyarakat. Kedua, golput ideologis, artinya golput yang dilakukan dengan kesadaran diri sendiri, dalam hal ini masyarakat menilai tidak ada kontestan yang pantas untuk diberi mandat, hal ini bisa disebut sebagai sikap protes terhadap sistem/lembaga/pemerintahan yang berjalan, hal ini menunjukkan adanya kesadaran berpolitik dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan golput sebagai sikap protes dirinya. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan golput, pertama, faktor sosial-ekonomi, hal ini menyangkut latar belakang sosial maupun keadaan ekonomi pemilih, kedua, faktor psikologis

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat, serta faktor rasional yang menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung rugi serta pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dilihat dari segi dampaknya, golput sendiri akan berpengaruh terhadap proses demokrasi dalam negara Indonesia, karena partisipasi masyarakat adalah kunci utama dari sebuah demokrasi yang berjalan di suatu negara, apabila, tingkat golput mencapai angka yang tinggi, maka suatu negara dianggap gagal dalam demokrasi karena tidak dapat mengajak rakyatnya untuk aktif memilih pemimpinnya. Apabila penyaluran suara melalui pilkada saja diwarnai dengan golput, maka, penyaluran aspirasi masyarakat untuk pemerintah dan pemimpin daerah tidak dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Maka dari itu, tindakan golput yang masih sering terjadi haruslah diminimalisir demi tatanan demokrasi yang berjalan dengan baik, dibutuhkanlah peran dari setiap sisi, baik itu masyarakat, partai politik, pemerintah daerah, dan salah satunya adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat begitu penting dalam setiap proses pemilu, sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bisa menyadarkan setiap individu masyarakat untuk turut memberikan suaranya dalam pemilu, termasuk pilkada.

Berikut adalah peran dan upaya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Pemilu dan pilkada yang demokratis serta dapat memutus rantai golput. 1. Meningkatkan Netralitas, Integritas dan Independensi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu pemegang kunci pemilu yang demokratis dengan menyelenggarakan pemilu yang jujur, dan adil harus bisa bersikap netral artinya tidak memihak pada salah satu kelompok tertentu atau kepada pihak tertentu. Kenetralan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat membuat masyarakat sebagai pemilih hak pilih tidak akan memberi pandangan pada sistem pemilu yang kotor, atau curang, dikarenakan sikap KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang netral. Partisipasi politik masyarakat dalam hal ini akan menyumbangkan faktor keberhasilan pemilu yang diselenggarakan. Selain

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

itu, dalam diri KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat integritas dan independensi antar anggota sangatlah penting. Kesatuan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu tanpa adanya paksaan atau ancaman serta sesuai dengan hati nuraninya merupakan bentuk independensi lembaga KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Peranan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Sehat kepada Pemilih Pendidikan politik ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna hak pilih dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pemilu, terutama kesadaran masyarakat dalam partisipasi memilih Kepala Daerah. Pendidikan politik menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna memberikan pengetahuan serta pemahaman politik kepada masyarakat untuk turut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dalam pendidikan politik yang dilakukan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bisa memberikan pemahaman mengenai apa itu Pilkada, bagaimana mengetahui calon pemimpin yang berkualitas, dan apa manfaat yang akan didapatkan masyarakat setelah menggunakan hak pilihnya.

Pada dasarnya, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan mengenai sistem Pilkada yang benar, pemilihan kepala daerah yang terkadang tidak berasal dari hati nurani masyarakat itu sendiri, melainkan karena faktor money politic, atau yang hanya sekedar mengikuti pilihan orang lain. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat juga melatih masyarakat untuk mengenal para calon berdasarkan visi-misinya saat berkampanye, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka.

3. Peranan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Sosialisasi pemilu dan Pilkada kepada Masyarakat Peranan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yang memiliki tingkat keefektifan serta keberhasilan yang tinggi adalah, melakukan sosialisasi Pilkada kepada khalayak umum. Sosialisasi dilakukan dengan mengutamakan masyarakat yang memiliki pemahaman politik paling rendah, sosialisasi dilakukan dengan membuat komunikasi dua arah dengan

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

masyarakat, masyarakat dapat melakukan diskusi mengenai sistem kampanye, ataupun sistem pemilihan.

Sosialisasi dilakukan tidak hanya pada satu golongan masyarakat tertentu tetapi dapat dilakukan pada setiap tingkatan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ataupun tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi bukan berarti masyarakat tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap partisipasi politiknya dalam memilih pemimpin. Tidak terkecuali pada partai politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat pun turut melakukan sosialisasi kepada partai politik untuk memberitahukan atau membimbing dalam sistem pencalonan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dalam melakukan sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bisa berdialog dengan menggunakan bahasa yang santun, dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui media massa, relawan demokrasi dan berbagai cara yang dapat menarik perhatian masyarakat. 4. Peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Melakukan Simulasi Proses Pemilihan Salah satu cara yang masih jarang dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melakukan kegiatan simulasi proses pemilihan calon pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Daerah.

Masyarakat seringkali membutuhkan panduan atau bimbingan tertentu sebelum menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah. Terutama bagi pemilih pemula yang melakukan pemilihan untuk pertama kalinya seringkali membutuhkan arahan atau panduan bagaimana melakukan proses pemilihan. Dalam hal ini, peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai kampanye para calon atau berdiskusi mengenai jalannya proses pemilihan. Namun, alangkah baiknya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut menyertakan gambaran mengenai proses pemilihan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan pertama kali, bagaimana caranya untuk memberi tanda kepada calon yang dipilih. Hal tersebut bersifat dasar, namun begitu penting untuk mengetahui serta memahami bagaimana proses pemilu berjalan dan proses pemilihan akan berjalan lancar. 5. Menyediakan Aksesibilitas

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

ke Tempat Pemungutan Suara Penyediaan fasilitas serta aksesibilitas bagi masyarakat pemilih merupakan kewajiban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk penyediaan aksesibilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas tertentu untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan pencerminan dalam persamaan hak untuk menggunakan hak pilihnya termasuk bagi penyandang disabilitas sekalipun. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum harus bisa menyediakan fasilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat terus mengalami peningkatan sebagai kepuasan atas peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kesadaran politik masyarakat dalam Pilkada sangat penting untuk mencegah dan memutus rantai tindakan golput masyarakat. Sehingga, sikap apatisme masyarakat mengenai kesadaran politiknya yang rendah dan kepercayaan pada pemerintah juga rendah, dapat ditingkatkan menjadi partisipasi aktif masyarakat dalam menyalurkan aspirasi/suara/pendapat yang ingin disampaikan kepada pemerintah, dapat dijadikan masukan dan dukungan oleh pemerintah sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang demokratis. Peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sangat vital bagi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya membuat kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat, bahkan pemerintah, dalam perannya mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih, jujur dan adil. Ketika tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu dan Pilkada tinggi atau meningkat, memberikan kesadaran bersama bahwa demokrasi di Indonesia dapat berhasil ketika masyarakat turut andil dalam memilih pemimpin yang diberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Daerah, atau bahkan sebagai Presiden sekalipun.

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu dan Pilkada masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan angka golput yang masih tinggi, golput hadir sebagai bentuk apatisme masyarakat pada perpolitikan Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat di antaranya adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat, rendahnya pengetahuan politik masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kurangnya kredibilitas para calon, dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh karena itu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, DPR, DPD, DPRD, dan Presiden sebagai pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki peranan yang sangat vital dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan menjadi lembaga independen netral serta berintegritas yang melaksanakan pendidikan politik, sosialisasi politik, simulasi pemilu, dan penyedia aksesibilitas dalam proses pemilu, membuat peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat diharapkan untuk terus dioptimalkan demi mencapai demokrasi yang berhasil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang ada di Indonesia. Dimana setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih serta mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hatinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Partisipasi masyarakat khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat diperlukan, sebab sebagai syarat untuk suksesnya Pemilu 2019 yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka angka Golput bisa tertekan dengan cara melakukan sosialisasi dengan program relawan demokrasi. Suatu hasil penelitian yang diperoleh bagaimana strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 strategi yang digunakan yaitu, strategi sosialisasi kepada: pedagang pasar, masyarakat nelayan,

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

masyarakat adat, penyandang disabilitas, umat agama, keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, masyarakat marjinal, komunitas, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, warga internet, dan komunitas peduli demokrasi. Adapun hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat melakukan sosialisasi dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 diantaranya sebagai berikut yaitu: hambatan secara eksteren, bersentuhan langsung dengan lapangan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi. Secara interen, adanya keterlambatan alat peraga yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada relawan demokrasi Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, Kurangnya respon masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wedi. (2017). Startegi polres sampan dalam memberantas peredaran narkoba di kabupaten sampan Madura. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Cresweel, J.W. 2013. Penelitian kualitatif & desain riset. Pustaka belajar: Yogyakarta.
- Efriza, (2012). Political explore: Sebuah kajian ilmu politik. Bandung: Alfabeta.
- Fred R. David (2012). Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Pt. Prenhallindo.
- Adityananingsih, D. P. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.
- SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 60-64.
<http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64>
- Anonime. (2019). Apa Sih Golput Itu? medium.com.
<https://medium.com/sayagolput/apa-sihgolput-itu-b2d4e3ee22a6> Arianto, B. (2011).
- Azhar Kasim. (2002), Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Jakarta: FEUI.
- Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT

Fahmi, Khoiril. (2010), “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Presiden 2009 (Studi di Kota Pekanbaru)”. Tesis, Pekanbaru: tidak dipublikasikan.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Japrizal. (2019), Partipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 (Studi di Kecamatan Tampat Pekanbaru) Tesis, Pekanbaru: tidak dipublikasikan. Kristiadi, J, 1997.